THE URGENCY OF FINTECH LENDING REGULATIONS AT BANK SYARIAH INDONESIA (BSI): ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR SERVICE

Nurfadhila¹, Hijrawati², Ilham³

UIN Alauddin Makassar

Email: nur831744@gmail.com¹, hijrawati788@gmail.com², rumiilham@yahoo.com³

Abstract – *The development of sharia fintech lending continues to stretch targeting the Muslim community. However, the implementation of sharia fintech lending in Indonesia is still oriented to conventional fintech regulations so that there is the potential for deviations in terms of sharia compliance (sharia compliance) and can provide a gap for providers to make various deviations that harm service users. This study aims to analyze the position of sharia fintech lending and the urgency of the formation of its regulations in Indonesia while also taking pictures of legal protection efforts for service users. This research is a normative juridical research instrumented by the statute approach and the conceptual approach. The data used in this study is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials obtained through library research or document studies. The results of the study found that the operationalization of the sharia fintech business has a sufficient legal umbrella to be used as the basis for the implementation of sharia fintech referring to several related regulations in the form of laws or government regulations and/or institutions such as POJK No. 77 of 2016 and DSN-MUI Fatwa No. 117 of 2018. However, the POJK has more connotations towards conventional fintech so that it has the potential to cause deviations from sharia compliance (sharia compliance). Therefore, the establishment of sharia fintech regulations is very important as a form of protection for service users.*

Keywords: *Sharia Fintech; P2P Lending; Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi industri dewasa ini membuat masyarakat mau tidak mau mulai bergeser dari paradigma konvensional kepada paradigma digital dengan memasuki era revolusi industri 4.0.1 Era revolusi industri 4.0 mengajak dan menekan pada sisi digitalisasi. Artinya, kehidupan manusia akan terus dibayangkan dengan teknologi “mesin” yang akan mengisi keseluruhan hajat hidup manusia. Salah satu aspek kehidupan manusia yang juga menyentuh dan berdampak terhadap kemajuan teknologi adalah industri keuangan dan bisnis yang memang merupakan kegiatan usaha berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dunia bisnis saat ini mengalami pergeseran ke arah digitalisasi dengan menginstrumentasikan terobosan kemajuan teknologi. Model transaksi dan perjanjian yang dahulu berbasis tatap muka (face to face), maka saat ini model tersebut bergeser kepada aplikasi digital yang terus berkembang dari hari ke hari. Suatu transaksi yang lahir dari sebuah kesepakatan perjanjian pada akhirnya juga harus mengikuti pola tersebut mengingat bahwa dalam kegiatan bisnis, jenis perikatan yang terpenting adalah perikatan yang lahir karena perjanjian. Begitu pun industri perbankan dan industri keuangan lain mulai beralih kepada model transaksi baru berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan fintech (financial technology). Fintech sebagai sebuah terobosan dan inovasi baru di bidang jasa keuangan menggunakan transaksi digital tanpa harus menggunakan uang fisik (cashless). Sama halnya dengan perbankan, fintech juga dihadapkan pada dua model penyelenggaraan, yaitu konvensional dan syariah. Masing-masing model memiliki visi serta segmentasi pasar yang berbeda. Utamanya, penyelenggaraan fintech syariah juga harus patuh pada prinsip-prinsip syariah Islam (sharia compliance) sesuai dengan ketentuan otoritas terkait. (Ma’ruf 2021) Di sisi lain, sistem syariah melalui sistem bagi hasil didisain untuk membangun kebersamaan serta kemitraan dalam menanggung resiko usaha dan pembagian hasil usaha antara pemilik dana atau pemodal (shahibul mal) dan pengelola. Sehingga dalam sistem syariah, konsep fintech akan lebih dibatasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Mukhlisin, sebagaimana dikutip Yarli, fintech syariah merupakan kombinasi serta inovasi yang terjadi di industri keuangan sehingga memudahkan berbagai macam transaksi keuangan serta investasi berbasis teknologi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.6 Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu sebesar 209,1 juta sehingga 12,65% penduduk muslim berada di Indonesia. Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi perkembangan fintech syariah di Indonesia. Perkembangan fintech Syariah di Indonesia diyakini dapat terus mengalami perkembangan yang cukup pesat sejalan dengan berkembangnya gaya hidup halal bagi komunitas masyarakat muslim yang kian hari makin menjadi perhatian publik bahkan dunia. Senada dengan hal tersebut, pemerintah belakangan ini juga ikut menggencarkan dan menaruh perhatian yang lebih kepada industri ekonomi halal serta industri keuangan syariah. (Jatnika et al. 2024)

Dalam perjalanannya, fintech syariah terus berkembang dan terus menggeliat. Para ahli menilai, bahwa industri keuangan syariah turut andil dalam memajukan perekonomian nasional. Itu sebabnya pemerintah terus menggelorakan keuangan syariah di segala sektor untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Prospek serta kemajuan fintech syariah yang semakin hari berkembang dan bertransformasi menjadi sebuah ekosistem bisnis, dimana perkembangan fintech akan menghasilkan ekosistem berbasis digital yang memetakan, memperluas, dan memonetisasi jejak digital.10 Indonesia ialah negara urutan ketiga dengan jumlah fintech Syariah terbanyak karena pada tahun 2017 telah mencapai 15 unit atau sekitar 14,56% dari 103 fintech syariah global. Hal ini tentu akan mendapat sorotan serius dari sebagian kalangan. Bukan tanpa alasan, mereka menilai bahwa pergerakan fintech syariah yang sejalan dengan prinsip syariah harus benar-benar diawasi oleh otoritas terkait agar meningkatkan nilai syaria compliance pada entitas bisnis syariah. Namun rupanya, fintech syariah juga memiliki resiko yang sama dalam hal pelanggaran hukum dalam praktik bisnis

yang dilakukan serta praktik penipuan lainnya. Berbagai permasalahan hukum kerap melekat dalam industri fintech tak terkecuali fintech syariah. Beberapa permasalahan tersebut antara lain penagihan yang bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi nasabah. Ironisnya, perusahaan fintech yang telah terdaftar dan berizin di OJK diduga ikut melakukan pelanggaran tersebut. Nasabah dan pengguna layanan fintech syariah seyogyanya mendapatkan perlindungan hukum yang sama sebagaimana konsumen fintech konvensional terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pihak penyelenggara. Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Ronald Yusuf Wijaya, meminta OJK untuk membuat aturan yang lebih umum terkait operasional fintech. Menurutnya, POJK fintech saat ini belum dapat mengakomodasi kebutuhan penyelenggara fintech syariah termasuk dalam hal perlindungan hukum bagi penggunanya. Sampai dengan saat ini, beberapa penelitian terkait fintech lending syariah baik secara langsung atau tidak sudah dilakukan, antara lain penelitian oleh Sugeng dan Annisa Fitria melihat adanya pengaturan fintech lending sebagai rambu-rambu pengaturan layanan P2P lending di Indonesia. Penelitian selanjutnya yang mengangkat fintech syariah dilakukan Fathul Aminuddin Aziz yang menyebutkan unsur-unsur fintech syariah, yaitu akuntabilitas, transparansi informasi, kewajaran, kesetaraan, kesalehan sosial, terhindar dari transaksi yang ribawi, maysir, gharar, risywah, tadlis, dan israf, serta dijamin kehalalannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/doctrinal legal research dengan menggunakan pendekatan statute and conceptual approach. Hasil yang hendak ditemukan dalam penelitian hukum normatif yaitu argumentasi hukum. Bahan penelitian hukum normatif diperoleh dari studi kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan dan bahan hukum primer (dokumen hukum tertulis) maupun bahan hukum sekunder (buku atau artikel ilmiah). Bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis secara preskriptif analitis untuk dilakukan pemeriksaan dan pembahasan sehingga menghasilkan informasi. Hasil analisis tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal dan teleologis. Metode tersebut digunakan untuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsepsi dan Regulasi Fintech Lending di Indonesia

Fintech dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai teknologi keuangan. Secara sederhana, fintech didefinisikan sebagai instrumentasi teknologi yang memberikan solusi di bidang keuangan serta intermediasi keuangan. Fintech atau tekfin (teknologi finansial) dalam bahasa Indonesia menjadi salah satu terma yang kian populer dewasa ini. Fintech dianggap merepresentasikan sebuah model transaksi keuangan yang efektif dan efisien meliputi pembayaran, peminjaman, investasi serta transaksi keuangan lain yang dilakukan secara cepat dan sederhana melalui mekanisme teknologi informasi.

The National Digital Research Centre (NDRC) yang bermarkas di Dublin, Irlandia, mengartikan fintech sebagai “innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan” ditambah dengan sentuhan inovatif berbasis teknologi. Dalam pengertian lain, fintech didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital terkait permasalahan keuangan dan finansial. Disisi lain, fintech juga hadir sebagai industri yang terdiri dari berbagai perusahaan penyelenggara transaksi keuangan berbasis teknologi informasi. Kelvin Leong lebih lanjut membatasi pengertian fintech kedalam tiga variable, yaitu finansial, manajemen teknologi dan manajemen inovasi. Cakupan bisnis fintech meliputi pembayaran (payment), peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembayaran (crowdfunding), situs pembanding produk keuangan (comparison site atau financial aggregator), riset keuangan dan lainnya. (Akuntansi 2024) Bank Indonesia dalam Peraturan

BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, jasa, teknologi, dan/atau model bisnis baru dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan serta keandalan sistem pembayaran.

Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 ayat (1) menggunakan istilah Inovasi Keuangan Digital (IKD) untuk menyebut tekfin dengan pengertian sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

Berkembangnya ekosistem bisnis fintech tetap sustain, perlu dukungan infrastruktur, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), literasi dan preferensi masyarakat, inovasi produk dan layanan, serta regulasi yang responsif. Untuk industri fintech, sejumlah regulasi dan kebijakan telah diterbitkan oleh sejumlah lembaga yang terkait, baik pemerintah pusat, BI, Kementerian Dalam Negeri, maupun OJK.

2. Model Penyelenggaraan Fintech Lending di Indonesia

Seperti diketahui bahwa dalam sistem perbankan, Indonesia menerapkan dual banking system yang mengaplikasikan dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sama halnya dengan industri perbankan, fintech juga menghadirkan dua model yang menampilkan model fintech konvensional dan fintech syariah.

Secara umum, terlihat bahwa fungsi dari fintech syariah dan fintech konvensional tidak nampak perbedaan yang berarti. Baik fintech syariah maupun konvensional keduanya sama-sama bermain dalam industri keuangan dan bisnis digital begitu pun keduanya juga memberikan layanan yang sama di bidang keuangan. Meski demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara penyelenggaraan fintech syariah dan konvensional yang dapat dilihat dari sisi akad yang digunakan dimana dalam fintech syariah, keseluruhan akad yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Prinsip dasar dalam syariat Islam bahwa akad yang digunakan dalam transaksi keuangan harus benar-benar terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan, yaitu maisir (bertaruh), gharar (ketidakpastian) dan riba (jumlah bunga melewati ketetapan). Prinsip ini yang menjadi perbedaan mendasar antara fintech syariah dan konvensional. Beberapa aspek lain yang juga cukup menonjol dalam hal perbedaan antara fintech syariah dan konvensional adalah transparansi dan keterbukaan, saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. (Erlangga and Krisnawati 2020) Fintech dengan sistem syariah pertama kali dikenalkan di Dubai Uni Emirat Arab pada tahun 2014. Pada waktu itu, Beehive, salah satu platform fintech yang berkedudukan di Dubai, mendapatkan sertifikat perdana yang menggunakan layanan peer to peer lending marketplace. Sejak saat itu, model bisnis yang dijalankan Beehive mulai diadaptasi di berbagai negara di Asia seperti Singapura dan Malaysia. Di Malaysia,

Hello Gold pun muncul dengan menggunakan teknologi blockchain yang mana juga menggunakan prinsip-prinsip syariah. Secara perlahan tapi pasti, para pemain fintech ini pun juga menjalar ke Indonesia. Semua fintech berasaskan syariat Islam itu pun sama, yakni tidak menggunakan riba sehingga diklaim aman sebab bunga yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan Islam.

Kemunculan fintech syariah di Indonesia semakin menarik perhatian banyak kalangan pasca dibentuknya asosiasi yang mewadahi fintech syariah di Indonesia yang bernama Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) pada tahun 2018. Keberadaan AFSI tersebut menaungi tidak kurang dari 7 penyelenggara fintech syariah dari total 148 pelaku fintech di Indonesia yang secara resmi terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Geliat fintech

syariah semakin menguat dengan dilahirkannya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hadirnya fatwa tersebut menjadi rambu-rambu penyelenggaraan fintech yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah (sharia compliance) serta tujuan dari syariah itu sendiri (maqasid syari'ah).

Secara prinsip, praktik yang diimplementasikan dalam fintech syariah setidaknya selaras dengan aturan-aturan yang berlaku pada jasa keuangan syariah yang secara mutlak harus terbebas dari maysir (spekulasi atau perjudian), gharar (ketidakpastian atau disembunyikan) dan riba (bunga). Beberapa model fintech syariah yang beroperasi di masyarakat antara lain:

- 1) Peer to Peer (P2P) Lending,
- 2) Crowd Funding
- 3) Digital Payment

3. Problematika dan Urgensitas Pembentukan Peraturan Fintech Lending Syariah

Penyelenggaraan fintech syariah hingga saat ini masih berkiblat kepada POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini secara umum mengatur setiap jenis fintech P2P baik dalam konsep syariah maupun konvensional. Dari sisi syariah, fintech syariah mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa DSN-MUI tersebut menjelaskan fintech syariah merupakan layanan jasa keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam yang mempertemukan atau menghubungkan antara investor dan peminjam untuk melakukan suatu akad pembiayaan melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. (Maulana, Murniningsih, and Prasetya 2022) Pada awalnya fintech di Indonesia menerapkan konsep konvensional di berbagai transaksinya. Selanjutnya pada tahun 2018, beberapa perusahaan penyelenggara fintech mulai mengadopsi konsep syariah kedalam sistem penyelenggaraannya. Baik fintech konvensional maupun syariah pada dasarnya tidak terlihat adanya perbedaan yang menonjol antara fintech konvensional dengan syariah. Keduanya sama-sama berfungsi memberikan layanan keuangan berbasis digital. Perbedaan yang sangat signifikan terdapat pada akad dimana dalam fintech syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam yaitu terhindar dari maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), tadbis (penipuan), dharar (bahaya), zhulm (kezaliman) dan riba (bunga). Disamping itu juga terlihat dari beberapa unsur lain seperti pengaturan denda, pengawasan kepatuhan syariah dan sebagainya.

Sebagai lembaga pengawas, OJK juga belum membuat regulasi khusus yang berkenaan dengan keberadaan fintech syariah. Penyelenggaraan fintech syariah masih mengacu kepada POJK No. 77 Tahun 2016 ditambah Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa perusahaan fintech syariah harus mengikuti prinsip Islam termasuk akad yang diterapkan harus sesuai dengan syariat Islam. Penerapan akad dalam Islam merupakan hal yang sangat esensial. Beralihnya kepemilikan suatu barang dari seseorang kepada orang lain tidak dapat dibenarkan kecuali dengan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Segala bentuk transaksi harus dilandasi oleh keberadaan akad atau bentuk tasharruf yang dibolehkan dalam Islam. Akad yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Akad juga yang akan mengatur hubungan antar pihak yang terlibat termasuk bagaimana hubungan ikatan antar pihak sejak dibuatnya akad sampai dengan berakhirnya akad tersebut. Dalam persepsi Islam, akad yang bathil akan mengakibatkan transaksi menjadi haram dan pada akhirnya dianggap sebagai memakan harta tanpa hak (bathil).

Hingga saat ini, fintech syariah masih mengacu kepada POJK No. 77 Tahun 2016 yang berkonotasi konvensional. Meski telah berlaku secara positif, namun dirasa masih belum mengakomodasi hukum syariah yang bersifat yuridis normative. Akibatnya, beberapa

perkara yang menyimpang dan berpotensi menyimpang dari ajaran Islam masih ditemukan dalam penyelenggaraan fintech syariah. Penyimpangan tersebut antara lain adanya sistem bunga, pembayaran denda serta jenis akad yang digunakan. Sementara perkara yang berpotensi menyimpang seperti halnya ketiadaan pengawas syariah dan penyelesaian sengketa yang belum mengatur penyelesaian sengketa bisnis syariah.

Masih bergantungnya penyelenggaraan fintech syariah kepada POJK tersebut tentu sangat disayangkan karena orientasinya yang lebih mengarah kepada sistem konvensional. Disamping itu, terdapat problem lain yang juga menyalahi ketentuan syariah seperti halnya penggunaan frasa “pinjam-meminjam uang” yang terdapat dalam POJK tersebut tentu mengarah kepada operasional fintech konvensional. Mengingat bahwa dalam fintech syariah, konsep yang dipakai adalah “pembiayaan” melalui berbagai akad-akad yang digunakan seperti murabahah, musyarakah, dan sebagainya.

Ketiadaan aturan yang mengatur mekanisme penyelenggaraan operasional suatu tindakan tentu akan menimbulkan potensi terjadinya kejahatan dan kecurangan yang tentu dapat merugikan berbagai pihak. Begitu pun dengan fintech syariah yang belum diatur secara khusus, akan berpotensi terjadinya kejahatan dan berbagai penyimpangan khususnya penyimpangan terhadap ketentuan syariat Islam seperti yang telah disebutkan diatas. (Donath et al. 2023)

4. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah

Salah satu unsur penting yang patut disorot dalam sebuah kegiatan bisnis adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen dalam hal ini adalah pengguna layanan. Dari perspektif konsumen, seringkali mereka baru tersadar akan kejahatan yang dialaminya setelah kejahatan tersebut menimpa dirinya. Fenomena ini kerap terjadi lantaran literasi yang rendah dan ekspektasi yang tinggi dari konsumen itu sendiri.

Dalam kegiatan pinjam meminjam uang secara konvensional, hubungan hukum para pihak terjadi secara langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1767 KUHPerdara, dengan muatan norma-norma hak dan kewajiban para pihak, besaran bunga pinjaman, bunga yang diperjanjikan. Pasal 1754 KUHPerdara mendefinisikan. (Adolph 2016)

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

Ketentuan norma hukum diatas merupakan norma hukum yang bersifat general tanpa membedakan mekanisme operasionalnya. Baik pinjam meminjam secara konvensional maupun digital harus sama-sama memahami hak dan kewajiban masing-masing. Di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan dari ancaman kejahatan serta i'tikad buruk dari salah satu pihak. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bahwa perlindungan hukum dalam setiap aktivitas bisnis merupakan suatu keharusan yang tak bisa dielakkan.

Guna melengkapi peraturan-peraturan tersebut diatas dan dalam rangka mengembangkan wacana pembentukan peraturan fintech syariah, maka perlu dibutuhkan perhatian terhadap beberapa aspek untuk bisa lebih memberikan perlindungan bagi para pihak, antara lain:

1) Pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan fintech syariah

Penyelenggaraan fintech syariah merupakan sebuah keniscayaan mengingat pangsa pasar serta potensi perkembangan yang diproyeksikan menjadi tantangan dan peluang bagi pemerintah dalam memajukan perekonomian nasional. Meski demikian, penyelenggaraan entitas bisnis tentunya memerlukan regulasi yang ajeg untuk dijadikan rambu-rambu dan payung hukum yang kuat. Regulasi yang ajeg dimaksud adalah peraturan yang memenuhi unsur-unsur asas legalitas, seperti *lex scripta*, *lex certa* dan *lex stricta* Disamping itu,

pengaturan tersebut hendaknya mengatur keseluruhan aspek yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan penyelenggaraan bisnis tersebut.

Pengaturan yang baik juga harus disertakan dengan pengawasan yang optimal. Sebagai asosiasi pelaku usaha, AFPI dan AFSI perlu meningkatkan peran dan kewenangan Komisi Etik dalam pengawasan dan penerapan pedoman perilaku anggota (code of conduct) untuk melindungi konsumen dan masyarakat, yang meliputi penetapan batas atas bunga (interest rate), denda, dan biaya pinjaman, termasuk pencegahan terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah (konsumen). Kode etik itu sekaligus menegaskan komitmen pelaku usaha dalam menerapkan standar praktik bisnis yang bertanggung jawab untuk melindungi nasabah (konsumen). (Herlina Hanum Harahap 2020)

2) Mitigasi risiko

Untuk melindungi kepentingan para pihak, POJK 77/2016 mengatur mitigasi risiko, kerahasiaan data, rekam jejak audit, dan sistem pengamanan.⁴⁵ Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan. Mitigasi risiko diharapkan dapat menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan Regulatory Sandbox secara efektif dan berkelanjutan, untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.

3) Koordinasi pemangku kepentingan (stakeholder)

Secara teknis, lembaga penyelenggara fintech perlu bekerjasama dengan Kementerian Informasi dan Teknologi Informasi (Kominfo). Selain itu, dari aspek regulasi, lembaga fintech harus membangun Kerjasama dengan regulator terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Koperasi.

Adapun regulator yang berperan sentral dalam proses bisnis antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Pengawas Perdagangan Berjangka.

4) Mekanisme penyelesaian sengketa

Kebutuhan akan badan penyelesaian sengketa merupakan hal yang esensial, karena kemungkinan terjadinya sengketa yang melibatkan transaksi dalam jumlah besar merupakan keniscayaan. Perselisihan yang timbul dari kegiatan ekonomi perlu diselesaikan sesegera mungkin. Menyelesaikan perselisihan ekonomi jangka panjang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, produktivitas yang lebih rendah, krisis yang berkepanjangan, dan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah, yang berdampak negatif pada komunitas konsumen. (Yeni Nuraeni 2019)

Penyelesaian konflik yang menjadi kebiasaan di masyarakat, terutama dalam kasus ekonomi syariah, lebih memilih cara tradisional melalui proses hukum. Peradilan yang diberdayakan untuk menangani perselisihan ekonomi Syariah adalah Inkuisisi. Kewenangan Inkuisisi diperpanjang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Inkuisisi. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa proses Islam seperti perkawinan, perceraian, rujuk, warisan, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah tunduk pada kewenangan Pengadilan Agama. Penerapan hukum positif merupakan fondasi di mana sistem peradilan agama memberikan kekuatan yang kokoh untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi Syariah dan menghilangkan opsi pilihan (choice of forum) di sana.

Fintech syariah jika tidak dikelola dengan baik, maka patut dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara. Kejahatan finansial yang terjadi pada fintech konvensional tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada fintech syariah, terlebih belum adanya regulasi yang ajeg perihal fintech syariah di Indonesia. Disamping itu, operasional prosedur fintech syariah yang menuntut adanya kepatuhan terhadap syariah (sharia

compliance) tidak ditemukan dalam peraturan fintech konvensional sehingga pengguna dapat terjebak pada transaksi terlarang dalam Islam. Perbedaan prinsip serta mekanisme prosedur yang ada pada fintech syariah ini mengharuskan pemerintah untuk mulai memikirkan urgensi pengaturan fintech syariah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa layanan fintech syariah khususnya pada layanan P2P lending.

KESIMPULAN

Dari segi yuridis, operasionalisasi bisnis fintech syariah memiliki payung hukum yang cukup untuk dijadikan dasar pijakan dalam penyelenggaraan fintech syariah dengan mengacu kepada beberapa peraturan terkait, seperti Peraturan Bank Indonesia No. 19 Tahun 2017, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 serta Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 yang ikut mengatur dari sisi syariah. Namun demikian, peraturan-peraturan tersebut masih menyisakan persoalan lain dari sisi perlindungan hukum bagi konsumen Muslim. POJK No. 77 Tahun 2016 yang lebih berkonotasi fintech konvensional berpotensi menimbulkan penyimpangan dari sisi perusahaan penyelenggara terhadap kepatuhan syariah (shariah compliance) sementara kedudukan Fatwa DSN-MUI belum cukup kuat secara legalitas.

Wacana pembentukan peraturan fintech syariah khususnya yang mengatur platform P2P lending merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna layanan yang lebih optimal. Beberapa aspek yang diharapkan menjadi fokus utama dalam peraturan fintech syariah kedepan antara lain

- a) pengaturan operasional fintech syariah
- b) pengawasan dalam pengembangan fintech syariah
- c) mitigasi risiko
- d) koordinasi pemangku kepentingan
- e) mekanisme penyelesaian sengketa
- f) perlindungan data pribadi pengguna layanan dan
- g) edukasi hukum bagi masyarakat

Saran

1. Studi Komparatif: Lakukan perbandingan antara regulasi fintech lending konvensional dan syariah, baik di Indonesia maupun negara lain seperti Malaysia atau UEA.
2. Pendekatan Empiris: Gunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif melalui survei atau wawancara dengan pengguna BSI, pelaku fintech, dan regulator untuk menggali perspektif lebih dalam terkait perlindungan hukum.
3. Analisis Efektivitas Regulasi: Tinjau seberapa efektif regulasi fintech lending saat ini diterapkan oleh BSI, serta hambatan implementasi yang dihadapi dalam konteks hukum dan syariah.
4. Model Perlindungan Konsumen Syariah: Kembangkan model perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip syariah dan berbasis kebutuhan riil pengguna layanan fintech syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. 2016. “濟無No Title No Title No Title.” 8(2):1–23.
- Akuntansi, Jurnal. 2024. “PENGARUH FINTECH TERHADAP INKLUSI KEUANGAN: TINJAUAN SISTEMATIS.” 4(2):50–63.
- Donath, Liliana, Gabriela Mircea, Mihaela Neamtu, and Nicoleta Sirghi. 2023. “A Mathematical Approach to Network Contagion Regarding Greening Banks’ Policies.” *Economic Research-Ekonomiska Istrazivanja* 36(1). doi: 10.1080/1331677X.2023.2180057.
- Erlangga, Muchammad Yudha, and Astrie Krisnawati. 2020. “Pengaruh Fintech Payment Terhadap

- Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa.” *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 15(1):53. doi: 10.21460/jrmb.2020.151.348.
- Herlina Hanum Harahap. 2020. “Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(2):186–90. doi: 10.32696/ajpkm.v4i2.551.
- Jatnika, Muhammad Dzulfaqori, Aneng Anisa, Daliah Mutiara, and Universitas Siliwangi. 2024. “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Implementasi Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2(5):164–70.
- Ma’ruf, Muhammad. 2021. “Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.” *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside* 1(1):42–61. doi: 10.53363/yud.v1i1.53.
- Maulana, Rinaldi, Rochiyati Murniningsih, and Wahyu Anggit Prasetya. 2022. “Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Dan Fintech Terhadap Keberlangsungan Bisnis Umkm.” *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen* 10(4):440–52. doi: 10.35145/procuratio.v10i4.2700.
- Mujahidin, Ali. 2020. “Pengaruh Fintech E-Wallet Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Generasi Millennial.” *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* 8(2):143. doi: 10.35314/inovbiz.v8i2.1513.
- Yeni Nuraeni, L. Alfies Sihombing,. 2019. “Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.” *Res Nullius Law Journal* 1(2):105–16. doi: 10.34010/rnlj.v1i2.2620.